

# Kata Pengantar

Dr. Saskia E. Wieringa

Kondisi Aceh setelah Tsunami tidak pernah akan sama. Manakala ratusan ribu perempuan Aceh, laki-laki dan anak-anak masih berduka atas kehilangan orang-orang yang mereka cintai upaya pertama untuk melakukan rekonstruksi Aceh dilaksanakan. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa semua penduduk Aceh dapat terlibat dalam upaya ini, dan bahwa pelbagai kepentingan, termasuk yang dirasakan oleh perempuan Aceh, diperhatikan? Hal ini adalah pertanyaan yang amat penting karena akan sangat berkaitan dengan jawaban yang akan terberi. Masa depan Aceh akan dibangun berjalan seiring dengan skenario yang berbeda. Satu pertanyaan mendesak adalah bagaimana kita memastikan bahwa kepentingan perempuan diperhatikan dalam Aceh Baru yang direkonstruksi ditengah reruntuhan Aceh yang dihancurkan oleh gelombang maut pada 26 Desember 2004?

Sekalipun Aceh dikenal sebagai daerah yang patriarkal dan menjunjung nilai tradisional Islam, daerah ini memiliki sejarah kepemimpinan perempuan, baik sebagai ratu ataupun pemimpin gerilya dalam perang melawan Belanda. Sejarah ini kerap kali ditiadakan. Saat ini, daerah Indonesia yang bercirikan sistem hukum Syariah, hanya mengenal dua sistem peraturan. Yaitu, kekuasaan militer sebagai pusat pemerintahan Indonesia disana, dan kekuatan patriarkal Islam dari tentara GAM. Berada diantara dua ranah kekuasaan yang maskulin inilah masyarakat sipil Aceh dirugikan. Terutama, suara perempuan tidak lagi didengar dalam arena politik,

karena perempuan secara publik menghilang, tersembunyi dalam baju mereka yang berlengan panjang dan kepala mereka yang ditutupi oleh jilbab. Sementara, tubuh perempuan merupakan arena pertarungan simbol kekuasaan yang paling dahsyat.

Aceh memiliki sejarah kekerasan yang panjang dan ditengah kondisi itu hak-hak perempuan diabaikan atau dijegal berkali-kali. Terutama oleh pemerintah kolonial Belanda dan kekuatan paska kolonial Suharto. Melalui peristiwa-peristiwa inilah kekuatan kepemimpinan Islam konservatif tumbuh. Marilah kita tengok kembali sejarah Aceh secara singkat.

Kerajaan Aceh didirikan pada awal abad ke enambelas. Dan, secara cepat berkembang menjadi negeri Sumatera Utara yang sangat berkuasa. Aceh menjadi salah satu dari negeri yang terpenting dari seluruh wilayah Malaysia-Indonesia. Islam telah ada di Aceh sejak abad tigabelas, tetapi pemimpin Islam, ulama, tidak secara langsung muncul sebagai kekuatan politik penting. Setelah berhasil memenangkan perang melawan Johor dan Malaka, Aceh dikenal sebagai kekuatan militer yang paling signifikan di sepanjang Selat. Pada awal abad ke tujuhbelas Sultan Iskandar Muda mengembangkan Aceh sebagai kekuasaan utama dari kepulauan Barat. Ketika penggantinya, Sultan Iskandar Thani, meninggal dunia jandanya menjadi Ratu Taj ul-Alam. Ratu Taj ul-Alam memerintah dari tahun 1641 hingga 1675. Kepemimpinan perempuan menghasilkan periode damai dengan Johor, namun seringkali dipengaruhi oleh ketegangan-ketegangan internal. Empat ratu memerintah Aceh antara tahun 1641 hingga tahun 1699. Kekuasaan para ratu ini ditantang oleh ‘jagoan’ bayaran yang mendatangi dan hendak menguasai *gampong* dan menguatnya kekuasaan para ulama. Sampai dengan tahun 1838 Aceh dipimpin oleh sebelas sultan. Perlawanan utama pada tahun-tahun itu adalah terhadap Inggris dan Belanda. Kekuasaan ini disepakati dalam Perjanjian London pada tahun 1821 yang menyatakan status kemerdekaan Aceh, namun dengan pengaruh Belanda atas negeri status kemerdekaan dikenali tetapi tidak didefinisikan.

Pada tahun-tahun itu Aceh dikenal sebagai wilayah penghasil lada. Sultan Tuanku Ibrahim mengembalikan kekuasaan politik Aceh dari tahun 1838 dan seterusnya. Untuk menghentikan berkembangnya kekuasaan ekonomi dan politik Aceh, kekuasaan kolonial Inggris dan Belanda menyusun Perjanjian Sumatra pada tahun 1871. Tanpa merasa perlu mengkonsultasikan hal ini dengan warga Aceh, Inggris mengakui hak Belanda atas Aceh. Belanda bertindak dengan sangat cepat untuk mengendalikan Aceh dan perang Aceh dimulai pada tahun 1873. Perlawanan panjang dan pahit mengikuti peristiwa itu, kaum ulama mendominasi kekuatan gerilya Aceh. Cut Meutia adalah pemimpin gerilya yang penting. Sementara Belanda mengaku beberapa kali bahwa pihak mereka yang memenangkan perang, banyak warga Aceh yang menyatakan bahwa perang itu belum berakhir ketika Jepang masuk Indonesia. Belanda tidak pernah kembali setelah Perang Dunia II. Setelah periode

damai yang relatif pendek, Aceh dan pemerintah pusat Indonesia memasuki kembali periode perlawanan yang panjang. Sebuah kondisi perlawanan berdarah antara tentara Indonesia, TNI dan gerakan perlawanan, GAM. Hak asasi dan terutama hak perempuan sekali lagi dijegal. Perempuan dilecehkan, diperkosa dan dibunuh oleh ke dua pihak yang bertikai itu.

Harapan optimis bahwa bencana Tsunami akan menyediakan momentum untuk mengembangkan kondisi damai yang abadi di Aceh, yang dapat ditumbuhkan oleh seluruh warga Aceh, termasuk perempuan. Namun, proses seperti itu tidak dapat dimulai tanpa mempertimbangkan konteks sejarah yang menunjukkan bahwa rasa keberpihakan nasionalis dan agama dibentuk serta saling kait dan berkelindan.

Buku ini mempertanyakan apa yang terjadi pada isu-isu perempuan dalam sejarah Aceh? Bagaimana bisa kepentingan perempuan dipinggirkan, dan sejarah kepemimpinan perempuan Aceh diabaikan? Bagaimana kita bisa memahami proses penyingkiran (*exclusion*) perempuan, kepentingan dan aspirasi mereka? Dan bagaimana kita dapat membalik proses itu, bagaimana kita dapat menjamin bahwa suara perempuan dapat didengar, bahwa kepentingan perempuan dimasukkan kedalam proses rekonstruksi masyarakat Aceh, yang kondisinya selama bertahun-tahun diguncangkan oleh perang dan sekarang oleh kekuatan Tsunami.

Untuk menjawab hal itu, buku ini menggunakan dua pendekatan penting dalam alat metodologi feminis, yakni analisa wacana dan sejarah lisan. Salah satu teks Aceh yang paling penting adalah Hikayat Perang Sabi, dianalisa secara teliti untuk melihat bahwa versi dominan yang ada sekarang menjadi berkembang. Tulisan ini adalah kajian yang berguna untuk mengangkat mitos yang paling menetap (persisten) bahwa teks sejarah selalu mengandung 'kebenaran'. Dalam hal ini, bagaimana 'kebenaran' dimanipulasikan dan dibentuk, serta bagaimana pendokumentasian capaian dan isu perempuan dihilangkan. Buku ini menyuguhkan sebuah refleksi yang cermat mengenai mekanisme penyingkiran perempuan. Sementara, bab-bab lainnya menginvestigasikan bagaimana perempuan dipstikasikan kedalam retorika pemerintah pusat Indonesia.

Dengan teknik paparan menguraikan yang rinci, buku ini menunjukkan bagaimana isu-isu perempuan dimarjinalisasikan dan tubuh perempuan dijadikan arena pertarungan kendali ideologi laki-laki. Selain hal itu, penulis buku ini juga menyediakan organisasi-organisasi perempuan dan kelompok-kelompok lain yang berjuang untuk menegakkan hak-hak asasi manusia dan perempuan dengan alat untuk menantang penyingkiran perempuan serta memperdengarkan suara perempuan.

Netherlands, Februari 2005